



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

Samarinda, 5 Februari 2025

Nomor : 800.1.3.3/154/BKD-S.IV
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Informasi Pengusulan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Gelombang I

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Terlampir

di – Tempat

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan dan pengembangan karier dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uji kompetensi Jabatan Fungsional yaitu:
 - a. Uji Kompetensi **Kenaikan Jenjang Jabatan** (KJ), dengan persyaratan terdiri dari:
 - 1) Telah memenuhi AK Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan;
 - 2) Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 3) Surat Keputusan tentang Jabatan Terakhir (termasuk PAK terakhir bagi Perpindahan Jabatan dari JF tertentu ke dalam JFAK);
 - 4) Surat Keputusan tentang Pelantikan JFAK dan PAK terakhir bagi yang pernah menjabat sebagai JFAK atau kenaikan jenjang;
 - 5) Form Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja;
 - 6) Form Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - 7) Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal "Baik";
 - 8) Formulir Pengalaman Kajian dan Analisis Kebijakan; dan
 - 9) Bukti Hasil Kajian dan Analisis atas nama yang bersangkutan sebanyak minimal 2 (dua buah);
 - 10) Sertifikat Diklat yg dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang.
 - 11) Untuk template dokumen nomor 5), nomor 6), dan nomor 8) dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/FormulirUkomAK>.
 - b. Uji Kompetensi **Perpindahan dari Jabatan Lain** (PJL), dengan persyaratan terdiri dari:
 - 1) Ijazah Terakhir yang telah di legalisir;
 - 2) Surat Keputusan tentang Pangkat Terakhir;
 - 3) Surat Keputusan tentang Jabatan Terakhir (termasuk PAK terakhir bagi Perpindahan Jabatan dari JF tertentu ke dalam JFAK);
 - 4) Kartu PNS (tertera nomor karpeg);
 - 5) Form Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja;
 - 6) Form Daftar Riwayat Hidup (DRH);

- 7) Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal “Baik”;
 - 8) Formulir Pengalaman Kajian dan Analisis Kebijakan; dan
 - 9) Bukti Hasil Kajian dan Analisis atas nama yang bersangkutan sebanyak minimal 2 (dua buah);
 - 10) Untuk template dokumen nomor 5), nomor 6), dan nomor 8) dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/FormulirUkomAK>.
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/855/M.SM.01.00/2024 Tanggal 4 Maret 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.2/27/B.ORG-I/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
 3. Sesuai dengan hal-hal di atas, dimohon untuk dapat diinformasikan kepada JF Analis Kebijakan khususnya dan Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah masing-masing pada umumnya yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk menyampaikan usulan uji kompetensi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur **sebelum tanggal 28 Februari 2025** dengan menggunggah usulan dan dokumen persyaratan pada tautan <https://tinyurl.com/UkomGelSatu>.
 4. Uji kompetensi akan diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yaitu Lembaga Administrasi Negara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan
Timur,



Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196709271988031013

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 800.1.3.3/154/BKD-S.IV

Tanggal : 5 Februari 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
10. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Kepala Dinas Perkebunan
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Kepala Dinas Perhubungan
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
19. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
23. Sekretaris DPRD
24. Inspektur Inspektorat Daerah
25. Direktur UPT RSUD A. Wahab Sjahranie
26. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
27. Direktur RSJD Atma Husada Mahakam